

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

Azmi Fendri, *"Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara"* (Jakarta: RajawaliPers, 2016).

Ibrahim, Ahmad. *Pembunuhan Dalam Konteks Keadilan Restoratif*. Kencana Prenada Media, 2021.

Lamintang, P.A.F dan Franciscus Thoejunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Press, 2020.

Mulyani, Rini. *Psikologi Pelaku Pembunuhan: Kajian Kasus Dan Analisis Profil*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1977>.

Rifa'i Abubakar, MA. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-press, 2021.

Santosa, H. Prayitno Iman, SH., M.H. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Alumni, 2022.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.

Triwidodo, Bambang. *Tinjauan Hukum Tentang Pembunuhan Berencana*. Rajawali Pers, 2020.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

II. Jurnal Ilmiah dan Artikel

Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)". UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3. (1), (2016).
- Anjar, Wahyuni, Bukhari Yusuf, Yuva Ayuning. "Analisa Peran Kepolisian Dalam Memberantas Perjudian (Studi Di Polres Aceh Tenggara)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 950. 06 (2020): 15.
- Anakotta, Marthsian Yeksi, Erwin Bernard Ubrwarin, and Roni Gunawan Raja Gukguk. "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4346>.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.
- Arief, Syamsiar. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 45. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11670>.
- Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (December 30, 2019): 33. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.
- Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum", 2016.

- Aryo Fadlian, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*,” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Cecep Wiharma, “*Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas*” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2019): 759, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.568>.
- Cindy Destiani et al., “*Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik*,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–41, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.
- Daeng M., Mohd. Yusuf, Shinta Frimayanti, Fajar Rizki, Rahmat Agusman Siddik, and Lestari Hulu. “*Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>.
- Damaika, Ika. “*Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*.” *To-Ra* 2 No. 3 (2016).
- Dewi, Wijayanti Puspita. “*Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.” *Hukum Magnum* 2 No. 1 (2019).
- Eki Sirojul Baehaqi, “*Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*” *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): 12–26, <http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13>.
- Ena, Zet, and Sirda H Djami. “*Peranan Motivasi Intrinsik Dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Minat Personel Bhabinkamtibmas Polres Kupang Kota*.” *Among Makarti* 13, no. 2 (2021): 68–77. <https://doi.org/10.52353/ama.v13i2.198>.
- Fariaman laila. “*Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*.” *Jurnal Panah Keadilan* 2, (2022).

- G. R. Gunawan, H., & Pangaribuan, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama,*” *Diktum* 2 (3) (2023): 25–34.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. “*Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.*” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.
- Harefa, Safaruddin. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.*” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 38. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.
- Hartono, Bambang, Aprinisa, and Aditya Akbarsyah. “*Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).*” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021).
- Hasaziduhu Moho. “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.’* *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019).
- Hutagaol, David. “*Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP.*” *Lex Crimen* 7, no. Vol. 7 No. 4 (2018).
- Jawak, Moranda P. “*Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan No. 228/Pid. Sus/2018/Pn Bgr).* (2019)”. 2019.
- Juwita, Rahmi, Firman, Rusdinal, and Muhammad Aliman. “*Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional Dalam Sosiologi Pendidikan.*” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1>.

- Krisnalita, Louisa Yesami. “*Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.*” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. “*Delik Pidana Yang Dapat Terjadi Dalam Virtual Reality Dan Akibat Hukumnya.*” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021).
- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.*” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Laia, Fariaman. “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.*” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023).
- Lubis, Muhammad Ridwan. “*Kejahatan Terorganisir Terhadap Pelacuran Anak Di Kota Medan Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Penelitian Di Kota Medan).*” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3464>
- Mubarak, Faiz. “*Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida,*” 2017.
- Muhaling, Aprianto J. “*Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang –Undangan Yang Berlaku.*” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 35.
- Moh Gandara, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,*” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.
- Montolalu, Astri C. “*Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).*” *Lex Crimen* V, no. 2 (2016).
- Nurisman, Eko. “*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12*

- Tahun 2022.*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 180. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Prabowo, Tyan Ludiana, and Irwansyah Irwansyah. “*Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri Kepada Masyarakat.*” *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 3 (2018): 99. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.1174>.
- Pualillin, Azriel. “*Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum.*” *Mandar: Social Science Journal* 1, no. 2 (2022): 88.
- Purba, Dody Prihatman. “*Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme.*” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10709–20. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3318>.
- Putri, Rianda Prima. “*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.*” *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 145–49.
- Ramadhan, Rio Febri, and Widia Sri Ardias. “*Konstrual Diri (Self Construal) Remaja Yang Mengalami Kematian Orang Tua.*” *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 10, no. 1 (2019): 79–90. <https://doi.org/10.15548/alqalb.v10i1.831>.
- Rendy, Muhammad, and Putra Pratama. “*Perlindungan Pasien Terhadap Praktek Pelayanan Kesehatan Akupunktur Di Kabupaten Banyumas*” 6, no. 2 (2024): 7204–15.
- Rivaldo, Deska, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. “*Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61 / Pid / 2020 / Pt . Tjk)*” 2, no. 1 (2021): 10–23.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag. “*Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian*

- Pasal 362 Kuhp.*” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 250.
- S, Laurensius Arliman. “*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum.*” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2017).
- Saputra, Ozan, and Rina Khairani Pancaningrum. “*Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 2023*, no. 13 (2023): 510.
- Saputra, Rian Prayudi. “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.*” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 53, no. 1 (2019): 1689–99.
- Sari, Indah. “*Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.*” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 60. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sari, Komala. “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Percobaan Pembunuhan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.*” *Angewandte Chemie International Edition* 6 No. 11 (2023). [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Setiyadi, Andrai, Ferry Fathurokhman, and Reine Rofiana. “*Penerapan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Teori Pidana.*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Simbolon, Idauli, and Albinur Limbong. “*Perawatan Setelah Kematian Dalam Budaya Suku Batak Toba: Studi Etnografi.*” *Nutrix Journal* 6, no. 2 (2022): 40. <https://doi.org/10.37771/nj.vol6.iss2.862>.
- Sri Neva Liza, Andreas, and Enni Savitri, “*Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kondisi Keuangan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening.*” *Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2019): 208–23.
- Suhariyono AR, “*Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-*

- Undang*". *Legislasi Indonesia Volume 6. 4* (2018): 846, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/337/221>.
- Susanto, Andi. "*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2022/Pn.Mjl)* Tesis," no. 128 (2023).
- Tanfidzan Robbika Murti, Karto Manalu, Yudi Anton Rikmadani. "*Hukum Dan Demokrasi (AHD)*" 24, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.61>.
- Tantaru, Fernando, Elsa Rina, Maya Toule, and Erwin Ubwarin. "*Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.*" *S A N I S A : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 34–41. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/515>.
- Tomy Michael. Hadi, Syofyan, "*Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara,*" *Jurnal Cita Hukum* 5.2 (2017): 1–43.
- Utami Ni Nyoman, Nengah Widya; Saptiari. "*Penerapan Data Mining Untuk Klasifikasi Penyebab Kematian Menggunakan Algoritma Support Vector Machine.*" *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi JIITUJ.* 4, no. Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, (2020): <https://online-journal.unja.ac.id/JIITUJ/article/view/13268/11199>.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Rahul Ardian, Nabilah Syaharani. "*Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak.*", 24, 2023.
- Zaini, Ahmad. "*Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham.*" *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

III. Internet

Mohamad, Taufik. “*Kronologi Santri Kuningan Tewas, Dikeroyok-Dikunci Di Gudang.*” Detikcom, 2023.
<https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7075720/kronologi-santri-kuningan-tewas-dikeroyok-dikunci-di-gudang>. Diakses Tanggal 24 Maret 2024 pada pukul 20.31.

Website Polisi Resor Kuningan
<https://polreskuningan.wordpress.com/contact/>. Diakses Tanggal 2 April pukul 16.40.

IV. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.